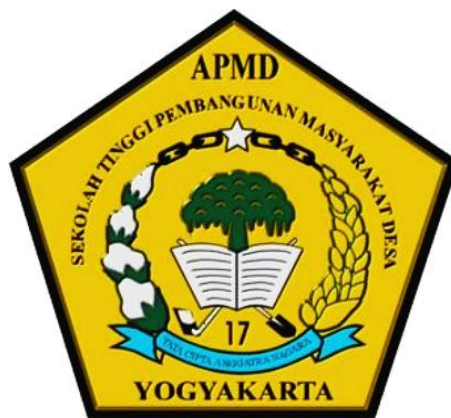


**SINERGITAS PEMERINTAH KELURAHAN DAN PKK DALAM
PENCEGAHAN STUNTING
(STUDI DI KELURAHAN KOTABARU, GONDOKUSUMAN, KOTA
YOGYAKARTA)**



Disusun oleh:

MARGARETA APRILIANI KRISTIN
18520146

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2023**

**SINERGITAS PEMERINTAH KELURAHAN KOTABARU DALAM
PENCEGAHAN STUNTING DI KELURAHAN KOTABARU,
GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Srata Satu (1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SRATA 1 (S1) SEKOLAH
TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji Program Studi
Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Yogyakarta pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

TIM PENGUJI

Nama		Tanda Tangan
1. <u>Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si</u> Ketua penguji/Pembimbing		
2. <u>Utami Suliistiana, S. P., M.P.</u> Penguji samping I		
3. <u>Dra.B. Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Penguji Samping II		

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Rigel Samaloisa, S. Sos., M.Si


HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Margareta Apriliani Kristin

Nim : 18520146

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “ **SINERGITAS PEMERINTAH KELURAHAN DAN PKK DALAM PENCEGAHAN STUNTING** “ hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan saya rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 16 Mei 2023



Margareta Apriliani Kristin

MOTTO

“tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”.

(ridwan kamil)

“apapun nanti hasilnya, banggalah terhadap setiap proses yang kamu lalui, hargai dirimu yang terus berusaha untuk menjadi lebih baik, ucapkan terimakasih pada dirimu yang tidak pernah menyerah”.

“jangan menunda pekerjaan sampai besok jika hari dapat diselesaikan maka tuntaskanlah”.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan kepada tuhan yesus kristus atas semua anugerah, berkat, kasih dan kemurahan-nya yang begitu luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dengan ungkapan hormat dan rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang maha kuasa yang sudah melindungi dan menyertai dalam setiap nafas kehidupan saya;
2. Kedua orang tua saya Bapak Kristo Jondi dan Ibu Tini Lajar atas segala doa, penguatan, dukungan serta motivasi yang tidak pernah henti sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Untuk saudara/saudari saya Ketty, Desyta, Audy, Kaka Elddy, Kaka Epry, Catra, Kaka Emi, Audre, Betrix, Queenza. Terima kasih telah menjadi saudara yang baik dan luar biasa bagi saya. Terima kasih banyak atas doa dan dukungan yang selalu memberikan saya semangat dalam setiap langkah dan perjuangan yang saya lakukan;
4. Dosen pembimbing terbaik, Bapak Drs Gatot Raditya, M. Si.. Terima kasih banyak karena telah sabar membimbing dan menuntun penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Oma sisi tersayang, terima kasih karena selalu mendoakan dan mendukung saya sampai saat ini;
6. Mama Edit, Mama Tuti, Bapa Lensi tercinta, terima kasih sudah selalu ada untuk mendukung dan mendoakan saya selama perkuliahan;
7. Untuk keluarga besar karot yang tersayang secara khusus Inang Itin, Inang Ani, Oma Filo, terima kasih untuk doa dan dukungan kepada saya selama mengerjakan skripsi;
8. Love of my life Christianto Saputra, terima kasih untuk kebaikan selama ini yang sudah membantu menyemangati dan mendoakan saya selama mengerjakan skripsi.

9. Terima kasih kepada teman-teman saya Rhen, Fidi, Ester, Kaka Sipri, Nurti, Ayu, Nova, Listin, Ita, Asti, Talia, Tami, Yani yang sudah menyemangati saya selama penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala perlindungan, berkat, dan rahmat yang tidak berkesudahan sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Kapasitas Pemerintah Kelurahan dalam Penguatan Potensi Pemuda Melalui Karang Taruna” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Ilmu Pemerintahan.

Tentu saja terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis belajar, berproses dan menimba ilmu.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si. selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Drs. Raden Yulianus Gatot Radiya, M. Si. selaku Dosen pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini memberi banyak ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

6. Seluruh karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani administrasi dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Bapak Urai Herman selaku Lurah Kelurahan Kotabaru tempat penulis melakukan penelitian.

Peneliti menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam Skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana yang di harapkan dalam dunia ilmiah dan akademik.

Yogyakarta, 16 Mei 2023

Peneliti,

Margareta Apriliani Kristin

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
INTISARI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian.....	6
1. Tujuan.....	6
2. Manfaat.....	7
D. Literatur review	7
E. Fokus penelitian.....	14
F. Kerangka konseptual	15
1. Teori Governance	15
2. Pemerintah Desa	17
3. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).....	20
4. Pencegahan Stunting	26
5. Sinergitas	32
G. Metode Penelitian	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Unit Analisis	38
3. Teknik Pengumpulan Data	41
4. Teknik Analisis Data	44

BAB II. PROFIL KELURAHAN KOTABARU	48
A. Sejarah Kelurahan Kotabaru.....	48
B. Geografis	50
1. Letak Wilayah	50
2. Kondisi fisik wilayah.....	51
C. Demografi kelurahan kotabaru	52
1. Penduduk berdasarkan jenis kelamin	52
2. Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.....	53
3. Kondisi ekonomi	53
D. Sarana dan prasarana	55
1. Prasarana ibadah.....	56
2. Sarana dan prasarana kesehatan	56
E. Lembaga Pemerintahan Kelurahan Kotabaru.....	58
1. Struktur Pemerintahan Kelurahan Kotabaru	58
2. Susunan pengurus	59
BAB III. ANALISIS SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN (PKK) DALAM PENCEGAHAN STUNTING	62
A. Relasi Pemerintah Kelurahan dan PKK dalam Pelaksanaan Pencegahan Stunting Di Kelurahan Kotabaru	62
1. Sosialisasi dan Pendataan Kelompok Sasaran.....	62
2. Pembentukan dan Pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS)	67
3. Menyelenggarakan Rembug Stunting Desa	68
4. Meningkatkan Pelayanan Posyandu	70
5. Meningkatkan atau Membangun Sarana dan Prasarana Intervensi Gizi Sensitive Sesuai Dengan Kewenangannya.....	72
B. Interaksi Pemerintah Kelurahan dan PKK dalam Pelaksanaan Pencegahan Stunting	73
C. Kendala atau Hambatan yang Dihadapi Kelurahan Kotabaru dalam Pencegahan Stunting	80

1. Fasilitas Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Pencegahan Stunting.....	81
2. Anggaran dalam Pencegahan Stunting.....	82
3. Kendala dalam Pencegahan Stunting	83
4. Pemerintah Kelurahan Kotabaru dalam Menyikapi Kendala Stunting.....	85
5. Kapasitas SDM dalam Upaya Pencegahan Stunting	86
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
PEDOMAN WAWANCARA	93
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan	40
tabel 2. 1 Luas wilayah menurut penggunaan	51
tabel 2. 2 Penduduk berdasarkan tahun.....	52
tabel 2. 3 Penduduk berdasarkan jenis kelamin	52
tabel 2. 4 Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.....	53
tabel 2. 5 Penduduk berdasarkan mata pencaharian.....	53
tabel 2. 6 Sarana dan prasarana pendidikan	55
tabel 2. 7 Prasarana ibadah.....	56
tabel 2. 8 Sarana dan prasarana kesehatan	57

DAFTAR BAGAN

bagan 2. 1 Struktur organisasi pemerintah kelurahan kotabaru	58
Bagan 2. 2 Struktur Organisasi PKK	59

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sinergitas pemerintah kelurahan dan PKK dalam pencegahan stunting di kelurahan kotabaru, yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masyarakat kurang merasakan kehadiran pemerintah kelurahan sebagai struktur paling dekat dengan masyarakat dan PKK yang memiliki fungsi untuk fasilitator, pembina dan pembimbing. Upaya dalam pencegahan stunting belum sepenuhnya terwujud karena masyarakat sendiri ikut terlibat dalam pencegahan stunting ini. Belum semua dukungan dan program yang di jalankan menjangkau ke anak-anak yang mengalami stunting akibat pemerintah kelurahan lebih memfokuskan tugas yang ada di kantor. Dengan ini munculah rumusan masalah bagaimana sinergitas pemerintah kelurahan dan PKK dalam pencegahan stunting.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kelurahan Kotabaru serta segala usahanya dalam memberikan pembinaan dalam pencegahan stunting di Kelurahan Kotabaru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam relasi pelaksanaan pencegahan stunting di kelurahan kotabaru sinergi yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi, selain itu ada juga pendataan terhadap kelompok sasaran, kemudian membentuk suatu wadah yang bertanggung jawab atas program yang dijalankan dalam pencegahan stunting yaitu rumah desa sehat (rds) yang beranggotakan PKK, kemudian menyelenggarakan rembuk stunting kelurahan guna menganalisis temuan yang ada di lapangan. Dalam pencegahan stunting, Pemerintah Kelurahan Kotabaru tampil sebagai institusi sekaligus aktor yang inklusif dengan berinteraksi secara intensif dengan PKK dan masyarakat. Kendala yang di hadapi dalam pencegahan stunting yaitu fasilitas penunjang, tingkat pendidikan, perhatian dan pola asuh orang tua terhadap anak, partisipasi dari ibu-ibu sasaran dalam mengikuti program pmt tidak dilanjutkan oleh ibu-ibu sasaran di rumah mereka masing-masing

Kata kunci: sinergitas, pemerintah kelurahan, PKK dan stunting.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pembangunan pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang infrastruktur tetapi pembangunan berbicara tentang bagaimana membangun manusia atau pembangunan manusia. Pembangunan tidak juga berbicara mengenai fisiknya saja tapi juga tentang manusianya, pembangunan manusia seutuhnya Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa pembangunan manusia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia, dan tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu untuk menyiapkan suatu manusia yang siap untuk menjadi suatu sumber daya manusia dibutuhkan suatu pembangunan dari manusia dimulai dari pembangunan pola asuh anak, pemberian makanan yang bergizi, dan pemenuhan gizi.

Oleh karena itu untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan masalah saat ini yaitu terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu

stunting, dan saat ini dilakukanlah percepatan penurunan stunting, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan lain sebagainya.

Pembangunan itu juga harus mengarah kepada bagaimana membangun sumber daya manusia itu sendiri. Apabila kita berbicara atau membahas suatu pembangunan sumber daya manusia pasti disana akan kita temukan bagaimana cara untuk mensejahterkannya. Dalam suatu pembangunan manusia yang menjadi salah satu tujuannya yaitu adalah bagaimana mensejahterakan manusia itu sendiri, memenuhi kesejahteraan yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga, serta masyarakat.(sunarti, 2012).

Tujuan pembangunan di negara manapun tentunya untuk kebaikan masyarakatnya dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana menciptakan suatu bangsa yang sejahtera dengan kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dari suatu pembangunan bahkan sampai kepada sumber daya manusia yang ada saat ini program pemerintah menjadi yang utama untuk keberlangsungan hidup dari warga negara untuk menuju hidup yang sejahtera diawali dengan setiap strategi daya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal mensejahterakan masyarakat yang ada. Dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah program pemerintah menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kelangsungan dan pembangunana manusia, yaitu bagaimana setiap program menjadi suatu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Adapun permasalahan yang sekarang ini sedang dihadapi bersama yakni, ketersediaannya sumber daya manusia atau pembangunan suatu daya manusia, pembangunan manusia bagaimana membangun sumber daya itu sendiri dan untuk pembangunan sumber daya manusia itu harus didukung dengan pemenuhan gizi dan bukan hanya anggaran saja tapi bagaimana cara membangunnya. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah perusahaan atau instansi/lembaga. Dengan permasalahan yang ada saat ini kita harus sigap untuk melihat masalah yang terjadi saat ini yaitu permasalahan stunting.

Saat ini pemerintah bahkan dari instruksi Presiden Republik Indonesia lewat Perpes Nomor 72 Tahun 2021 terus berupayah agar ke depannya masalah stunting di indonesia akan dapat terlaksana. Dengan target penurunan angka

stunting yaitu 14% di tahun 2024, hal ini bukanlah suatu yang mudah dapat kita capai tetapi dengan adanya suatu target yang ditetapkan sekiranya jika kedepannya tidak mencapai 100%, akan tetapi pemerintah akan terus berupaya mencapai target yang telah ditentukan oleh presiden.

Dalam hal ini peran pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan serta desa diharapkan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, mampu menjalankan setiap tupoksi serta mampu berkoordinasi dalam membantu percepatan penurunan angka stunting. Sesuai dengan arahan dari presiden bahwa yang menjadi pelaksana dalam menangani atau mengikat kendali atas pencegahan stunting yaitu badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) sesuai dengan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 yaitu diketuai oleh kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN).

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi anak lebih rendah dari standar usianya. Dalam perhitungannya wilayah Kotabaru merupakan zona merah stunting, berdasarkan rumus perhitungannya: jumlah penduduk yang sedikit, jumlah balita yang sedikit, misalnya balitanya 10 sedangkan jumlah stuntingnya 3, maka terlihat bahwa kasus stunting tergolong besar. Penanganan stunting di kelurahan kotabaru yaitu melalui pmt (pemberian makanan tambahan). Dari data yang dikutip tahun ini kondisi stunting pada balita berjumlah (12) anak, kemudian setiap bulan sudah dibantu dengan pmt (pemberian makanan

tambahan) yang biasanya didapat dari warga swadaya dan instansi sekitar, seperti tni, karena stunting itu merupakan salah satu faktor kurang gizi. Adapun kerja sama dengan masyarakat setempat dan PKK yaitu posyandu dan dasat (dapur atasi stunting). Upaya yang dilakukan pemerintah kelurahan dalam pencegahan stunting berupa pemberian makanan tambahan, meningkatkan kegiatan di posyandu berupa bina keluarga balita mengenai stunting, lalu ada juga dapur atasi stunting yaitu sebulan sekali memberikan pmt kepada yang stunting yaitu tambahan makanan bergizi. Selain itu penanganannya juga didapat dari program keluarga harapan (pkh) berupa pembinaan ibu hamil, faktornya karena pernikahan dini dan kurang gizi ibu hamil dan faktor ekonomi yang mempengaruhi daya beli. Di kelurahan kotabaru pemerintah kabupaten/kota tidak memberikan anggaran untuk pencegahan stunting karena kelurahan kotabaru tidak mempunyai logos stunting.

Meskipun demikian, selama ini masih terjadi permasalahan di tingkat kelurahan dalam kaitannya dengan kerjasama pemerintah kelurahan dan PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga) dalam pencegahan stunting yang bertujuan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompetisi. Seperti yang terjadi di kelurahan kotabaru, masyarakat kurang merasakan kehadiran pemerintah kelurahan sebagai struktur paling dekat dengan masyarakat dan PKK yang memiliki tugas dan fungsi untuk fasilitator, perencanaan, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing. Upaya pemerintah kelurahan dan PKK

dalam pencegahan stunting di kelurahan kotabaru belum sepenuhnya terwujud, apalagi ditambah semua masyarakat terlibat dalam pencegahan stunting karena stunting merupakan program nasional, kemudian bkkbn yang mempunyai petugas atau kader yang diutus untuk penanganan stunting di setiap kecamatan sehingga pemerintah kelurahan lebih memfokuskan tugas yang ada di kantor. Belum semua dukungan dan program yang dijalankan menjangkau ke anak-anak yang mengalami stunting. Kemudian dalam intervensi penurunan stunting kurangnya kerjasama dan komunikasi antara Pemerintah Kelurahan, PKK, kader kesehatan dan masyarakat dalam penanganan masalah stunting. (lurah dan seklur: kamis, 30 maret 2023).

Penelitian ini mempunyai relevansi dengan salah satu poin penting dalam mazhab timoho yaitu governance, secara sederhana, governance berbicara tentang interaksi atau relasi antara pemerintah dengan pihak luar, akan menjadi otokratik-birokratik seperti dunia perkantoran. (Sutoro Eko, 2021:15).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana sinergitas pemerintah kelurahan dan PKK dalam pencegahan stunting di kelurahan kotabaru?

C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian

1. Tujuan

- a. Mendeskripsikan sinergitas pemerintah kelurahan kotabaru dan PKK dalam pencegahan stunting.

- b. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencegahan stunting.

2. Manfaat

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pembaca mengenai sinergitas pemerintah kelurahan dan PKK dalam pencegahan stunting.

- b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pemerintah kelurahan kotabaru dan PKK kelurahan kotabaru, gondokusuman, yogyakarta.

D. Literatur review

Pertama, dalam jurnal Ahmad Saufi (2021) yang berjudul “dinamika collaborative governance dalam penanggulangan stunting di tengah pandemi covid-19” dijelaskan bahwa stunting menjadi persoalan utama dan tantangan negara dalam menghadapi bonus demografi 2045. Belum tuntasnya penanggulangan stunting, prioritas negara kembali diuji dengan adanya pandemi *coronavirus disease (covid 19)*. Darurat di bidang kesehatan terutama peningkatan gizi dan pemulihan dampak perekonomian menjadi semakin terpuruk. Di tengah situasi krisis ini, peran multi stakeholder sangat dibutuhkan dengan membangun komitmen, kesamaan perspektif, dukungan sumber daya dan kekuatan aktor. Modal utama dalam kolaborasi adalah komunikasi.

Pemerintah sebagai aktor kunci kolaborasi harus mengembangkan ide dan gagasan yang mendorong para pihak untuk melakukan aksi strategis. Tidak hanya itu, dukungan sumber daya dan keterbukaan publik diperlukan untuk menciptakan kepercayaan dari semua stakeholder. Lemahnya dukungan dan pemerintah masih bersifat sentralistik dan dominan pada penguasaan sumber daya, menjadikan kolaborasi tidak berjalan dengan baik. Kolaborasi menginginkan kesamaan perspektif, menghormati inovasi dan menghindari adanya ketergantungan sumber daya pada stakeholder lainnya.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh r. Widodo triputrta, dkk (2021) yang berjudul “model pencegahan stunting di kabupaten flores timur nusa tenggara timur dijelaskan bahwa pencegahan stunting di kabupaten flores timur” dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada sasaran 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) anak balita dan ibu hamil. Intervensi gizi spesifik ditangani langsung oleh dinas kesehatan sedangkan intervensi sensitif pencegahannya secara konvergensi antar imstitusi pemerintahan daerah dan stakeholder. Untuk mempercepat pencegahan stunting pemerintah daerah membuat suatu inovasi yang disebut “gerobak cinta” berupa pemberian makanan tambahan terfokus kepada anak stunting dan ibu hamil selama 90 hari dengan memanfaatkan tanaman pangan lokal masyarakat. Terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan stunting ini antara keterbatasan sumber daya manusia infrastruktur penunjang yang belum memadai, tingkat partisipasi yang minim, pangadaan bahan pangan yang sulit terjangkau dan keberlanjutan program pmt terfokus gerobak cinta oleh ibu sasaran di rumah.

Hal tersebutlah mempengaruhi praktik governing di bidang pembangunan kesehatan ini tidak berjalan semestinya.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh titis srimurni, dkk (2022) yang berjudul “pemenuhan hak kesehatan balita dalam rangka pencegahan stunting melalui pelaksanaan posyandu keliling di kabupaten lumajang” dijelaskan bahwa pemenuhan hak anak balita di bidang kesehatan, diantaranya dilakukan melalui kegiatan posyandu, dengan pola pelaksanaan terjadwal dan terencana dan mengacu pada undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan serta undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Namun di masa pandemi covid-19, kegiatan yang biasanya dilaksanakan dalam satu ruang tertutup terpaksa mengalami perubahan, yakni mengharuskan kader melakukan jemput bola terhadap obyek yang dituju, sehingga para balita tidak sampai kehilangan hak-haknya untuk menunjang pertumbuhan di usia emasnya sekaligus mengantisipasi terjadinya stunting. Tujuannya untuk mengkaji secara yuridis terkait upaya memenuhi kesehatan balita, pada unsur kesesuaian berat dan tinggi badan, kecukupan gizi, kestabilan emosi dan sebagainya, meskipun situasinya ada keterbatasan. Hasilnya menunjukkan bahwa secara yuridis pelaksanaan posyandu keliling sangat sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan, yang tidak mengharuskan para balita dan ibu hamil bertatap muka dengan orang banyak, namun pemantauan kesehatannya termasuk antisipasi terjadinya stunting, tetap terlaksana oleh kader yang bergerak dari rumah ke rumah, sehingga dapat meminimalisir penularan covid-19. Sedangkan secara sosial, kehadiran kader ke rumah para balita menjadi bukti nyata bahwa

pelayanan kesehatan balita, tetap menjadi perhatian pemerintah daerah di samping kesibukannya mengatasi pandemi. Dengan demikian posyandu keliling bisa menjadi alternatif model yang strategis dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi balita, tanpa menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh neni kumayas, dkk (2022) yang berjudul “strategi pemerintah dalam mengatasi stunting di kabupaten kepulauan sangihe” dijelaskan bahwa strategi pemerintah dalam pengentasan stunting sudah baik karena dilihat dari dinas kesehatan dalam hal ini angka stunting yang pertahun menurun dan hal ini sudah baik, selanjutnya keterlibatan pemimpin dalam hal ini selaku pihak lintas sektor yang ada mencakup pihak pemerintah kecamatan bahkan kelurahan hingga ke kampung harus terus ditingkatkan. Yaitu selanjutnya dilihat dari setiap program sebagian program sudah berjalan dengan baik tapi ada sebagian program yang mencakup program dalam hal penggunaan aplikasi yang perlu terus bimbingan dari pihak bkkbn sendiri untuk pelatihan penggunaannya dan lebih baik menyediakan alternatif lain.

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh yudiana (2022), yang berjudul strategi penguatan sdm dalam percepatan penurunan stunting di provinsi kepulauan riau dijelaskan bahwa kelemahan berupa rendahnya kapasitas pelatihan bagi tenaga kesehatan dan kader, belum memiliki modul pembelajaran praktis dan kompetensi kader dalam keanekaragaman pangan belum memadai. Strategi utama yang direkomendasikan adalah: 1) mengembangkan media pembelajaran dengan sistem informasi

penanggulangan stunting (silanging) berbasis digital sebagai salah satu sarana pendukung untuk menguatkan kompetensi sdm baik bagi tenaga kesehatan, para kader maupun masyarakat umum yang dapat diakses melalui gadget android sesuai dengan menu yang disediakan berupa; menu pemetaan stunting, menu buku saku, menu halo stunting, menu pmt dan menu pojok aksi; 2) tim penggerak PKK provinsi dan kabupaten/kota melakukan penguatan kapasitas kader dalam penganekaragaman gizi pmt melalui pelatihan dan praktek memasak pmt gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan bagi balita; 3) memberikan prioritas bantuan modal dengan pinjaman tanpa bunga bagi umkm yang bergerak dalam diversifikasi pangan lokal seperti sagu, ikan, rumput laut dan berbagai pangan lokal inovasi baru lainnya yang digunakan sebagai bahan dasar dalam mengembangkan produksi usahanya, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat, prevalensi stunting menurun dan terwujudnya sdm provinsi kepri yang sehat dan tangguh.

Keenam, penelitian ini dilakukan oleh yeni widyastuti, dkk (2022), yang berjudul “implementasi kebijakan konvergensi pencegahan stunting melalui rumah desa sehat (rds) di desa sidangsari kecamatan pabuaran kabupaten serang” dijelaskan bahwa kebijakan pencegahan stunting menjadi tantangan tersendiri di masa pandemi covid-19 karena meningkatnya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Desa sindangsari, kecamatan pabuaran, kabupaten serang provinsi banten telah membentuk rds dengan menggunakan dana desa (add) yang digunakan untuk penanganan stunting dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi balita stunting.

Ketujuh, penelitian ini dilakukan oleh arum fitria adriyani (2019), yang berjudul “peran imp dalam mengatasi stunting di kapung kb ngudi kencana desa kalitenggar kidur kabupaten purbalingga kecamatan padamara” dijelaskan bahwa imp telah melaksanakan 6 (enam) peran baktinya untuk menurunkan angka stunting di wilayah. Keenam peran bakti tersebut adalah pengorganisasian; kie dan konseling; pencatatan, pendataan, dan pemetaan sasaran; pelayanan kegiatan dan kemandirian.

Kedelapan, penelitian ini dilakukan oleh sunaryo (2021), yang berjudul “implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di kabupaten bandung” dijelaskan bahwa percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting tidak berhasil dalam menurunkan kasus stunting di kabupaten bandung walaupun kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting telah dilaksanakan, baik intervensi gizi sensitif maupun spesifik dikarenakan pandemi covid-19.

Kesembilan, penelitian ini dilakukan oleh dody novandi (2021), yang berjudul “aksi pencegahan kasus stunting di kota samarinda melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat” dijelaskan bahwa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (pro-bebaya) yang diusung oleh walikota samarinda dan wakil walikota samarinda pada saat ini bisa menjadi salah satu instrumen untuk bisa mensinergikan berbagai elemen dalam mendukung implementasi intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk penanggulangan stunting di kota samarinda. Pro-bebaya mampu menjadi sebuah inovasi baru dan pendukung implementasi intervensi gizi spesifik dan

sensitif serta bisa menjadi trigger munculnya gerakan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam mereduksi prevalensi stunting di kota samarinda. Guna mendukung akselerasi penurunan prevalensi stunting di kota samarinda kiranya pemerintah kota samarinda bisa menjadikan pro-bebaya menjadi bagian dari rencana aksi pencegahan stunting.

Kesepuluh, penelitian ini dilakukan oleh febi rama silpia (2019), yang berjudul “pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting di desa pancasila kecamatan natar nampung selatan” dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting (gangguan pertumbuhan pada anak) di desa pancasila kecamatan natar lampung selatan melalui beberapa tahapan yaitu tahap penyadaran, yaitu dengan sosialisasi, tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan, dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan yang terakhir tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inivatif untuk mengantarkan pola kemandirian, masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tetap memerlukan perlindungan, yaitu dipantau dengan posyandu. Pembinaan terhadap masyarakat dalam penanggulangan stunting dikatakan berhasil, untuk mengantarkan pola kemnadirian, masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat karena dengan adanya program tersebut penderita stunting di desa pancasila dari 30 orang di tahun 2017 sekarang menjadi 12 orang, dan masyarakat sudah mengerti tentang gaya hidup sehat.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa kesamaan diantaranya pembahasan tentang stunting. Namun saat ini belum ditemukan penelitian terdahulu tentang sinergitas pemerintah kelurahan dan PKK dalam pencegahan stunting di kelurahan kotabaru, gondokusuman, yogyakarta. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian tentang sinergitas pemerintah keluarga dan PKK dalam pencegahan stunting. Hal ini dimaksudkan agar masalah dalam pelaksanaan program pencegahan stunting dapat teratasi guna untuk mencegah jumlah stunting di tahun selanjutnya. Dengan demikian program ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai dengan tujuan kerjasama pemerintah keluarga dan PKK dalam pencegahan stunting di kelurahan kotabaru.

E. Fokus penelitian

Berdasarkan pemaparan di latar belakang masalah, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada:

1. Relasi Pemerintah Kelurahan dan PKK dalam pelaksanaan pencegahan stunting di Kelurahan Kotabaru.
2. Interaksi Pemerintah Kelurahan dan PKK dalam pelaksanaan pencegahan stunting.
3. Kendala atau hambatan yang dihadapi Pemerintah Kelurahan dan PKK dalam pencegahan stunting.

F. Kerangka konseptual

1. Teori Governance

Penelitian ini dipandu oleh perspektif *governance* sebagaimana yang diajarkan oleh mazhab timoho. *Governance* yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah *governance* yang diajarkan oleh pemikir-pemikir neoliberal. *Governance* yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah *governance* dalam pengertian “*governance without government*” maupun “*good governance*”. Dua mantra ini bersifat normatif yang hendak “melubangi pemerintah negara”. Selain itu, secara keilmuan, kedua mantra ini tidak sanggup memberi daya interpretasi dan eksplanasi terhadap praktik pemerintahan. Karena itulah, gilberto capano, michael howlett dan m ramesh (2005) mengatakan bahwa “*bringing government back in*” untuk merepons kegagalan *governance*. Mereka memiliki argumen kuat untuk mendukung pandangan bahwa pemerintah terus memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan dan bahwa jika fakta ini tidak dipertimbangkan maka persepsi risiko tata kelola (*governance*) ditambahkan pada pandangan yang normatif atau perspektif tanpa basis empiris yang memadai.

Governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah *governance* dalam pengertian meta-*governance* yang tidak bias teknokratik-neoliberal. Jadi, *governance* dalam penelitian ini bukan berbicara tentang “*governance without government*”, melainkan “*government with governance*”. Jika mengikuti logika mazhab timoho, secara sederhana, *governance* berbicara tentang interaksi atau relasi antara

pemerintah dengan pihak luar. Pemerintah tanpa *governance* atau interaksi dengan pihak luar, akan menjadi otokratik-birokratik seperti dunia perkantoran. Sebaliknya, “*governance without government*” akan membuat pemerintahan seperti dunia pasar (sutoro eko, 2021: 15).

Menurut *governance*, pemerintahan adalah proses interaksi dan proses konstitutif antara pemerintah dengan masyarakat (politik, ekonomi, sipil) agar tidak terjebak pada pemerintahan sebagai perkantoran. Konsep *governance* dipahami sebagai tata pemerintahan yang di antaranya adalah interaksi antara pemerintah-negara dengan masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (sutoro eko, 2020: 1). *Governance* adalah kondisi, aktivitas, kegiatan dalam melaksanakan pemerintahan atau suatu proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara, pembangunan masyarakat, ekonomi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan privat atau swasta. Konsep *governance* merujuk pada pola hubungan antara pemerintah, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama terkait pengaturan proses pemerintahan dengan pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun warga masyarakat. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi negosiasi, kolaborasi, konsolidasi, partisipasi, transparansi, responsivitas, rente, privatisasi, rente, *free rider*, bandit, dll (sutoro eko, 2020: 2).

Penelitian ini memusatkan perhatian pada relasi antara pemerintah kelurahan dengan PKK dalam pencegahan stunting. Relasi antara pemerintah kelurahan dengan PKK dibutuhkan karena kedua institusi ini mempunyai peran yang sekalipun berbeda tetapi dapat saling menopang satu sama lain. Jika kedua institusi ini membentuk relasi kemitraan maka upaya pencegahan stunting dapat berjalan dengan maksimal. Sebaliknya, jika kedua institusi ini membentuk relasi konflikual, maka upaya pencegahan stunting tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, pencegahan stunting di kelurahan sangat bergantung pada relasi yang terbentuk antara kedua institusi tersebut.

Pemerintah kelurahan merupakan aktor sekaligus institusi yang berwenang dan mempunyai hak untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pencegahan stunting merupakan bagian dari kepentingan masyarakat.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa yaitu:

- a. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
- b. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam buku sosiologi pedesaan yang ditulis oleh dr. Adon nasrullah jamaludin, m.ag. Ada beberapa defenisi atau pengertian tentang pemerintahan desa, yaitu sebagai berikut.

- a. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggarannya ditujukan kepada kepala desa. Pemerintah desa adalah proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Pemerintah desa, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Desa dibentuk atas asas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- c. Pemerintah desa menurut umber saparin, merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar ataupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.
- d. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Menurut hanif nurcholis, pemerintah mempunyai tugas pokok, yaitu (1) melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum,

membangun dan membina masyarakat; (2) menjalankan tugas pembantu dan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut, lahirlah fungsi pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah lembaga formal sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa serta bpd yang mengatur kehidupan bermasyarakat untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014, kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten. Kewenangan desa yang diatur berdasarkan keputusan menteri dalam negeri tentang pedoman umum kewenangan desa, penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa pencalonan dan pemilihan serta penetapan perangkat desa, pembentukan dan penetapan lembaga kemasyarakatan, penetapan dan pembentukan badan permusyawaratan desa. Pencalonan pemilihan dan penetapan anggota perwakilan desa, penyusunan dan penetapan anggaran dan pendapatan belanja desa, pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat, penetapan peraturan desa, penetapan kerja sama antar desa, penetapan

pinjaman desa, penetapan dan pembentukan badan usaha milik desa, pengeluaran izin skala desa, penetapan tanah kas desa, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengelolaan tugas pembantuan, pengelolaan dana atas bagi hasil, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka disimpulkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

3. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang sudah begitu melembaga baik baik dittingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa. Bahkan kemudian PKK dengan kegiatannya telah menambah hingga ke tingkat dusun dan rt. Agar pengelolaannya efektif, dibentuklah tim pembina (tp) PKK di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Tim pembina PKK berfungsi untuk mengakomodir dan memfasilitasi berbagai kegiatan dalam rangka menunjang berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing (indarwati, 2017:864). Pada awalnya, organisasi ini diberi nama pendidikan kesejahteraan keluarga yang

di dalamnya menekan partisipasi perempuan dan merupakan program pendidikan perempuan. Namun, seiring berjalannya waktu, organisasi ini berubah nama menjadi pembinaan kesejahteraan keluarga yang di dalamnya menekankan partisipasi perempuan dan merupakan program pendidikan perempuan. Namun, seiring berjalannya waktu, organisasi ini berubah nama menjadi pembinaan kesejahteraan keluarga. Perubahan nama ini dilandasi oleh pemikiran bahwa organisasi ini tidak hanya mendidik kaum perempuan, akan tetapi membina serta membangun keluarga di bidang mental, fisik, dan material serta peningkatan sandang, papan, kesehatan, serta mutu dan juga keluarga sejahtera (haniz dan marzaman, 2019:124).

Di sisi programnya, pada awalnya organisasi PKK diarahkan untuk mendorong kemajuan kaum perempuan agar bisa memainkan peran gandanya secara baik, yakni sebagai pengelola keuangan dalam keluarga dan bisa mencari nafkah serta sebagai pelaku pembangunan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pemberdayaan perempuan berkembang juga dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berdesa, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan supaya melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik. Selain itu, PKK diharapkan mampu untuk menghadirkan kemandirian serta mengangkat harkat dan martabat perempuan sebagai bagian dari keluarga (pontoh, 2013).

Bergulirnya reformasi dan disahkannya gbhn pada tahun 1999 oleh mpr serta adanya paradigma baru pembangunan dan semangat otonomi

daerah, maka kepanjangan PKK kembali berubah menjadi pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Dengan perubahan kepanjangan ini, maka tujuan PKK juga berubah. PKK sebagai organisasi yang melibatkan perempuan dan keluarga mempunyai tujuan utama yaitu mewujudkan kesejahteraan keluarga. Halm ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang berpegaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Jika kesejahteraan keluarga terwujud, maka akan lahir ketentraman, kedamaian, dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, kesejahteraan keluarga merupakan salah satu tolok ukur pembangunan.

Gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang kemudian disingkat gerakan PKK merupakan gerakan nasional yang berorientasi pada pembangunan masyarakat. Gerakan pembangunan masyarakat ini dimulai dari bawah (dari, oleh, dan untuk rakyat) demi terwujudnya keluarga yang beriman, bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, serta mandiri, memiliki kesadaran akan kesetaraan gender, kesadaran hukum dan lingkungan (permendagri nomor 1 tahun 2013 bab 1, pasal 1, ayat 5). Ini berarti bahwa organisasi PKK memiliki tugas untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat terutama kaum perempuan.

Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 di atas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup kewenangan tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) bisa dibilang cukup luas. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PKK menasar pada keluarga di pedesaan yang kemudian ditingkatkan dan dikembangkan lagi pada

kemampuan mental, spiritual, fisik, dan material. Jadi, pada dasarnya organisasi PKK merupakan organisasi yang dibentuk untuk mendukung dan membantu program-program pemerintah. Bentuk dukungan dan bantuan itu berupa menyuplai data beberapa aspek yang diperlukan seperti data warga, data ibu hamil, bayi, balita, kelahiran, kematian sampai pada kegiatan masyarakat (hanis dan marzaman, 2019:125).

Penelitian ini mengarahkan perhatian pada upaya pengaruh utama gender melalui pengakuan akan hal politik, ekonomi, sosial kaum perempuan. Penelitian ini hendak mengungkap pengarusutamaan gender melalui pemerataan suara (*voice*), akses (*access*) dan kontrol (*control*) terhadap perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Singkatnya, penelitian ini memfokuskan diri pada pemberdayaan perempuan melalui pengorganisasian.

Pengorganisasian perempuan merupakan salah satu upaya jangka pendek untuk melawan ketidakadilan gender. Pengorganisasian dianggap sebagai langkah paling konkrit untuk memberdayakan perempuan secara lebih baik. Pengorganisasian perempuan merupakan salah satu langkah pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Salah satu organisasi perempuan yang diyakini dapat meningkatkan partisipasi perempuan di desa adalah organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Dengan begitu, penelitian ini memusatkan perhatian pada pengorganisasian perempuan melalui pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga merupakan suatu wadah yang dibentuk untuk mengakomodasi kaum perempuan sehingga memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan desa. Selain itu, pemberdayaan kesejahteraan keluarga merupakan bentuk perkumpulan ibu-ibu untuk menampung aspirasi kaum perempuan. Singkatnya, organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga merupakan wadah untuk meningkatkan posisi tawar perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Meskipun begitu, penelitian ini hendaknya tidak dipahami sebagai upaya untuk mengkultuskan PKK. Sebab dalam praktiknya PKK masih mempunyai banyak kekurangan dan kendala. Oleh karena itu, penelitian ini juga berikhtiar untuk membongkar kegagalan PKK dalam melakukan pemberdayaan kaum perempuan di desa. Ada beberapa hal yang dapat menjadi pijakan dalam melihat kegagalan PKK, yaitu:

Pertama, struktur organisasi PKK, dari dulu hingga sekarang tetap eksis, sebagai organisasi korporatif yang hierarkis dari tim penggerak PKK pusat yang dipimpin oleh istri menteri dalam negeri, kemudian turun ke PKK provinsi yang dipimpin oleh istri gubernur, PKK kabupaten/kota yang dipimpin oleh istri bupati/wali kota, PKK kecamatan yang dipimpin oleh istri camat, dan sampai PKK desa yang dipimpin oleh istri kepala desa. Dengan semikian, jabatan ketua dalam organisasi PKK merupakan sesuatu yang terberi bukan melalui suatu proses demokratis, yaitu musyawarah anggota.

Kedua, lemahnya modal sosial. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan salah satu institusi korporatis yang masih eksis di desa. Sebagai institusi korporatis, PKK memang memiliki jembatan sosial (*social bridging*) yang inklusif, yakni melampaui batas-batas agama, suku, dan kerabat. Namun, institusi korporatis tetap eksklusif secara vertikal, yakni melakukan eksklusi terhadap kaum perempuan, kaum miskin, dan kaum marginal lainnya. Institusi korporatis juga miskin jaringan sosial yang berorientasi keluar (*outward looking*) (Sutoro Eko, 2015:82-83).

Ketiga, bergantung pada pemerintah. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh negara secara seragam pada masa orde baru hingga sekarang. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga dibentuk untuk mewadahi kegiatan kaum perempuan. Sebagai institusi korporatif, nilai-nilai yang terkandung dalam institusi korporatis adalah harmoni dan partisipasi. Secara umum, PKK mempunyai tiga tujuan, yaitu: (1) kontrol dan kanalisasi kepentingan masyarakat secara tunggal dan seragam; (2) sebagai wadah pemberdayaan dan partisipasi; serta (3) untuk melayani program-program pemerintah serta mengambil dan memanfaatkan dana (BLM) dari pemerintah.

Sementara itu, PKK mempunyai tiga fungsi, yaitu: (a) sebagai alat kontrol negara terhadap berbagai segmen masyarakat; (b) sebagai kepanjangan tangan negara untuk melayani masyarakat karena keterbatasan kemampuan negara; dan (c) sebagai wadah penyaluran kepentingan dan

aktivitas berbagai segmen masyarakat. Dengan demikian, institusi-institusi ini menjadi penerima manfaat dari program pemerintah (sutoro eko, 2015:82-83).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa PKK merupakan bagian dari birokrasi negara yang masuk sampai ke ranah desa. Sebagai organisasi bentukan negara, maka PKK juga memakai konsep negara menggerakkan pembangunan (*state driven development*) dalam pembangunan desa. Konsep pembangunan seperti ini pada gilirannya akan menghancurkan desa sebagai entitas lokal yang berdaulat. Selain itu, sebagai organisasi bentukan negara, maka PKK memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah. Sebab pada dasarnya PKK merupakan institusi penerima manfaat dari program pemerintah.

4. Pencegahan Stunting

Berdasarkan ketentuan pasal (74) ayat (1) undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Yang mengatur belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah dan pada ayat (2) mengatur kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, yang salah satunya prioritas pencegahan dan penanganan kekurangan gizi stunting berskala desa. Jurnal iren ressie ridua (1), gloria miagina palako djurubahasa (2020). Stunting

adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak pada anak yang disebabkan karena kekurangan asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan kurangnya stimulus psikosial. Stunting ditandai dengan panjang/tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Anak stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan berisiko menurunkan produktivitas. Stunting adalah kondisi kekurangan gizi kronis. Secara fisik anak stunting memiliki tinggi badan di bawah standar pertumbuhan anak normal seusianya (who, 2007).

Menurut menteri kesehatan ri (2011), stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya (kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan secara lahir tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 tahun. Stunting yang dialami anak dapat disebabkan oleh tidak terpaparnya periode 1000 hari pertama kehidupan mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas seseorang di masa depan. Stunting dapat pula disebabkan tidak melewati periode emas yang dimulai 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan pembentukan tumbuh kembang anak pada 1000 hari pertama. Pada masa tersebut nutrisi yang diterima bayi saat didalam kandungan dan menerima asi memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan saat dewasa. Hal ini dapat terlampaui maka dapat terhindar dari terjadinya stunting pada anak-anak dan status gizi yang kurang (depkes,

2015). Balita pendek dan sangat pendek adalah balita dengan panjang badan (tb/u) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku who-mgrs (*multicenter growth reference study*) tahun 2006. Stunting pada anak merupakan indikator status gizi yang dapat memberikan gambaran gangguan keadaan sosial ekonomi secara keseluruhan di masa lampau. Stunting merupakan istilah para nutrinis untuk penyebutan anak yang tumbuh tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya (bayi pendek). Stunting (tubuh pendek) adalah keadaan tubuh yang sangat pendek hingga melampaui deficit. 2 sd di bawah median panjang atau tinggi badan populasi yang menjadi referensi internasional. Stunting adalah keadaan dimana tinggi badan berdasarkan umur rendah, atau keadaan di mana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya (mcn, 2009;22).

a. Tanda stunting

Stunting adalah tinggi badan yang kurang menurut umur (-2 sd), ditandai dengan lambatnya pertumbuhan anak yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan sehat sesuai usia anak. Stunting merupakan kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan dimasa lalu digunakan sebagai indikator jangka panjang untuk gizi kurang pada anak. Stunting dapat didiagnosis melalui indeks yang dicapai pada pra dan pasca persalinan dengan indikator kekurangan gizi jangka panjang, akibat dari gizi yang tidak memadai dan atau kesehatan. Stunting merupakan perumbuhan linier gagal untuk mencapai potensi genetik sebagai akibat dari pola makan yang buruk

dan penyakit. Stunting yang terjadi pada masa anak merupakan faktor resiko meningkatnya angka kematian, kemampuan kognitif dan perkembangan motik yang rendah serta fungsi tubuh yang tidak seimbang.

b. Penyebab stunting

Pada masa ini merupakan proses terjadinya stunting pada anak dan peluang peningkatan stunting terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan. Faktor gizi ibu sebelum dan selama kehamilan merupakan penyebab tidak langsung yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu hamil dengan gizi kurang akan menyebabkan janin mengalami *intrauterine growth retardation* (iugr), sehingga bayi akan lahir dengan kurang gizi, dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan disebabkan kurangnya asupan makanan yang memadai dan penyakit infeksi yang berulang, dan meningkatnya kebutuhan metabolic serta mengurangi nafsu makan, sehingga meningkatkan kekurangan gizi pada anak. Keadaan ini semakin mempersulit untuk mengatasi gangguan pertumbuhan yang akhirnya berpeluang terjadinya stunting (depkes, 2011). Gizi buruk kronis (*stunting*) tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi disebabkan oleh banyak faktor. Terdapat tiga faktor utama penyebab stunting yaitu asupan makanan yang tidak seimbang (berkaitan dengan kandungan zat gizi dalam makanan yaitu karbohidrat, protein, lemak,

mineral, vitamin, dan air), riwayat berat badan lahir rendah (bblr), riwayat penyakit, praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan pemberian air susu ibu (asi) secara eksklusif, tidak menerima makanan pendamping air susu ibu (mp-asi).

c. Dampak stunting

Stunting dapat menyebabkan penurunan intelegensia, sehingga prestasi belajar menjadi rendah dan tidak dapat melanjutkan sekolah. Anak yang menderita stunting berdampak tidak hanya pada fisik yang lebih pendek saja, tetapi juga pada kecerdasan, produktivitas dan prestasinya kelak pada saat dewasa, sehingga akan menjadi beban negara. Selain itu dari aspek estetika, seseorang yang tumbuh proporsional akan kelihatan lebih menarik dari yang tubuhnya. Gagal tumbuh yang terjadi akibat kurang gizi pada masa-masa emas ini akan berakibat buruk pada kehidupan berikutnya dan sulit diperbaiki. Masalah stunting menunjukkan ketidakcukupan gizi dalam jangka waktu panjang yaitu kurang energi dan protein, juga beberapa zat gizi mikro.

d. Proses pencegahan stunting

Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan

program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin. Dengan kata lain, konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Upaya konvergensi terwujud apabila:

- 1) Program/kegiatan nasional, daerah dan desa sebagai penyedia layanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi sesuai kewenangan.
- 2) Layanan dari setiap intervensi gizi spesifik tersedia dan dapat diakses bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama rumah tangga 1.000 hpk (ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan).
- 3) Kelompok sasaran prioritas menggunakan dan mendapatkan manfaat dari layanan tersebut.

Upaya konvergensi percepatan penurunan stunting dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran regular yang berbasis data dan informasi faktual agar program dan kegiatan yang disusun lebih

tepat sasaran melalui pelaksanaan analisi situasi awal, pelaksanaan rembuk stunting, penyusunan rencana kerja.

Analisis situasi awal dan rembuk stunting dilakukan untuk mengetahui kondisi stunting di wilayah kabupaten/kota, penyebab utama, dan identifikasi program/kegiatan yang selama ini sudah dilakukan. Dari analisi ini diharapkan dapat menentukan program/kegiatan, kelompok sasaran, sumber pendanaan dan lokasi upaya percepatan pencegahan stunting di daerah, yang kemudian diterjemahkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (rkpd), rencana kerja organisasi perangkat daerah (opd) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).

Pada tahap pelaksanaan, konvergensi diarahkan pada upaya untuk melaksanakan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara bersama dan terpadu di lokasi yang telah disepakati bersama, termasuk didalamnya mendorong penggunaan dana desa untuk percepatan pencegahan stunting dan mobilisasi kader pembangunan manusia (kpm).

5. Sinergitas

Kata sinergitas berasal dari bahasa Yunani yaitu *synergos* yang berarti bekerja sama-sama. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Menurut Doctoroff (1977:76) penciptaan sinergitas dapat terjadi di dalam hubungan sinergi dengan

beberapa syarat utama yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas.

Adapun sinergi dalam konteks komunikasi, menurut dedi mulyana (2007:46) adalah bekerja bersama sama untuk mencapai tujuan secara maksimal. Setiap anggota di dalam organisasi mempunyai perasaan harmoni dengan anggota lainnya sehingga memungkinkan mereka menuntaskan pekerjaannya dengan baik dan penuh kegembiraan. Sinergitas merupakan pendekatan yang paling efektif untuk memecahkan persoalan dari pada sikap yang apatis. Sinergi berbeda dengan kompromi, karena dalam kompromi pihak-pihak yang terlibat harus mengorbankan sebagian dari tujuan agar bisa saling bekerja sama.

Sinergitas dapat dibangun dari rasa kepercayaan, adanya rasa keterbukaan, kerjasama yang baik antar individu untuk membentuk sebuah kreatifitas guna menemukan pemecahan masalah atau ide baru dalam alternatif jalan ketiga (jalan tengah) tanpa menimbulkan konflik sosial dengan individu lain. Sinergitas dapat terjadi dalam beberapa aktor dalam organisasi maupun kelompok. Hubungan sinergitas dapat berkembang dan mengalir antara individu, kelompok dengan bekerja sama secara terus menerus satu dengan yang lain, sehingga diantara mereka dapat berpikir dan bergerak sebagai satu kesatuan.

Hal yang sama tulis oleh (Najiyati, dk, 2011) menyatakan bahwa sinergitas sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran atau output lebih baik dan besar. Sinergitas dapat

dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas muncul ketika bagian-bagian organisasi saling berinteraksi untuk menghasilkan dampak gabungan yang lebih besar daripada apabila dilakukan sendiri oleh masing-masing bagian. Agar mencapai kondisi yang sinergi atau demi menghasilkan output yang jauh lebih besar, tidak dapat dihindari bahwa terdapat tingkat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Kutipan dari Sulasmi (2009:219-237) yang menyebut bahwa Covey menggunakan istilah sinergi dalam suatu hubungan komunikasi yang terbentuk dari integrasi antara semangat kerjasama yang bertaraf tinggi dan hubungan saling percaya yang bertaraf tinggi pula. Pengertian sinergi ini dapat dipersamakan sebagai suatu perkembangan kreativitas yang dibangun secara bersama dari rasa saling percaya dan semangat kerjasama yang sangat tinggi, hingga kedua belah pihak akan mampu menyatakan dengan terbuka gagasan dan pendapat masing-masing, tanpa merasa terancam dan khawatir dengan kemungkinan konflik yang terjadi. Menurut Covey, komunikasi yang sinergistik dibangun dari suatu bentuk keberanian dan ketegasan, dengan sekaligus konsiderasi yang tinggi pula. Kerjasama yang efektif merupakan modal sosial bagi organisasi terutama bila kerjasama itu didedikasikan bagi kepentingan organisasi maupun baik digunakan dalam pemerintahan.

Aktivitas sinergi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aktivitas yang berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru.

Sinergi merupakan hasil dari suatu relasi dialog antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan. Dapat dikatakan bahwa untuk menghasilkan kualitas sinergi diperlukan suatu perilaku kerjasama yang merupakan suatu konsekuensi dari semangat berkelompok atau kebersamaan. Semangat berkelompok ini menjadi produktif, bila anggota kelompok bersifat kritikal (penting), karena mereka selalu mencari hal-hal yang baru dan inovatif. Bahkan, semangat berkelompok ini akan semakin meningkat, bila anggota kelompok bekerja keras, tuntas, dan berorientasi pada kualitas, yang didukung oleh infrastruktur organisasi. Untuk itu untuk menjalankan suatu program perlu adanya komunikasi yang baik, koordinasi, dan sinkronisasi.

Dari kutipan jurnal yang disampaikan oleh Hirta Juni Ardiansyah pada penelitian terdahulu bahwa dalam sinergitas konsep yang dipilih sebagai pendukung teori ini ialah perlunya komunikasi dan koordinasi. Koordinasi sebuah proses pepaduan sasaran-sasaran dan kegiatan yang terpisah pada sebuah organisasi agar tercapai tujuan yang lebih efisien. Komunikasi dan koordinasi selalu diperlukan dalam suatu organisasi untuk keselarasan atau keterpaduan antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang maupun lembaga.

Kemudian dari jurnal Fitria Rahmawati A.E., Sulistiyanto, dan Edy Saptono mengatakan bahwa untuk mewujudkan sinergi yang dimaksud dalam penelitian yang dikemukakan ialah faktor penting yaitu komunikasi

dan koordinasi. Dalam komunikasi pada jurnal ini ada dua cara yang dilakukan untuk berkomunikasi yaitu komunikasi primer dan komunikasi skunder. Komunikasi primer melalui komunikasi tatap muka atau secara langsung, sedangkan komunikasi skunder yaitu berupa laporan tertulis atau surat edaran yang disampaikan melalui radio, website resmi dan lain sebagainya.

Selain itu dalam jurnal yang telah dilakukan penelitian oleh Frenly Sukarno yang berjudul “Koordinasi Dalam Pengelolaan Objek Wisata Taman Nasional Kayan Mentarang di Desa Tanjung Lapang Kilometer Delapan Kabupaten Malinau”. Mengatakan bahwa selain perlunya koordinasi yang dijalankan oleh objek wisata taman nasional kayan mentarang di Desa Tanjung Lapang Kilometer Delapan ini, hendaknya pro-aktif dalam melaksanakan koordinasi sehingga perlunya bentuk koordinasi, komunikasi, sinkronisasi. Sinkronisasi dalam penelitian ini untuk menyelaraskan hasil dari komunikasi, koordinasi yang dijalankan. Maka dari itu peneliti ingin menambahkan sinkronisasi, yang dimana akan membantu penyelarasan untuk mempermudah pembangunan desa. Untuk itu penulis disini untuk memperoleh sinergitas Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa yang baik, maka perlunya koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi yang akan dilaksanakan.

Kerangka konseptual merupakan alur konsep-konsep yang diambil dari berbagai teori yang dianggap relevan dengan fokus atau judul penelitian ini. Dalam upaya-upaya menjawab masalah serta teras sesuai dengan

permasalahan yang ada dirumuskan dalam penelitian. Penelitian ini membahas sinergitas Pemerintah Desa dan PKK dalam pencegahan stunting di kelurahan kotabaru. Yang menjadi permasalahan adalah minimnya tingkat kewaspadaan dan kerjasama Pemerintah Desa dan PKK terhadap kasus stunting.

Adanya permasalahan tersebut, pemerintah desa dan PKK memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus stunting. Oleh karena itu pemerintah desa harus memiliki kerjasama atau sinergi yang baik dengan PKK sehingga dapat membantu mengatasi masalah stunting yang terjadi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu (Lasa; 2009:7). Kata ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna yang bersifat keilmuan atau yang memenuhi syarat (kaidah) ilmu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Sinergitas Pemerintah Kelurahan dalam Pencegahan Stunting di Kelurahan Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta, menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (natural) dan peneliti menjadi instrumen kunci serta hasil penelitiannya

lebih menekankan pada makna dari yang di teliti daripada mengeneralisasikan obyek penelitian (Sugyono,2007).

Metode penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan pola/nilai dan bahkan data yang ada di lapangan (Moleong,2002:5). Kemudian untuk mempertajam gambaran terhadap fenomena yang di teliti, maka interpretasi langsung dari fenomena/kejadian memperoleh prioritas yang tinggi dalam dalam penelitian kualitatif tidak semata-mata di maksudkan untuk di buktikan, namun dapat saja untuk di kembangkan berdasarkan data yang di kumpulkan.

Untuk mengungkapkan fenomena sosial secara jelas dan cermat, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksploratif. Menurut Bungin (2007:28), penelitian eksploratif adalah penelitian terhadap permasalahan yang belum pernah dijejaki, belum pernah diteliti orang lain, sehingga walaupun dalam “kegelapan” peneliti eksplorasi tetap berusaha menemukan permasalahan yang sedang atau akan diteliti tersebut. Penelitian ini meneliti topik yang masih jarang dibahas sehingga sulit untuk memprediksi apa yang akan ditemukan di lapangan, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif eksploratif.

2. Unit Analisis

Unit analisis merupakan satuan tertentu yang di perhitungkan sebagai subjek penelitian, dalam definisi yang lain, unit analisis di artikan

sebagai sesuatu yang berkaitan dengan dengan fokus/komponen yang di teliti. Unit analisis ini di lakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga, karena terkadang peneliti masih bingung membedakan objek penelitian, subjek penelitian, dan sumber data. Unit analisis penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya.

Jadi, unit analisis dalam penelitian ini mencakup individu yang direpresentasikan oleh beberapa masyarakat kelurahan, kelompok yang di repesntasikan oleh PKK, organisasi direpresentasikan oleh Pak Lurah, dan wilayah yaitu Kelurahan Kotabaru, Gondokusuman. Adapun unit analisis dalam penelitian ini yaitu:

a. Obyek Penelitian

Menurut Supranto (2000:1) objek penelitian merupakan himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. tujuan dari objek penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian dalam tulisan ini yaitu Sinergitas Pemerintah Kelurahan dan PKK dalam Pencegahan Stunting, yang dimaksud dengan subjek penelitian yaitu; orang, tempat atau benda yang diamati sebagai sasaran, atau keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Subyek Penelitian

Subyek yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu; aparat Pemerintah Kelurahan, PKK, dan masyarakat Kelurahan Kotabaru. Peneliti menggunakan teknik pengambilan informan yang didasarkan pada tujuan tertentu, atau orang-orang yang betul-betul dipilih yang memiliki kriteria sebagai sampel.

Arikunto (2016:26) mengatakan bahwa subyek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variable peneliti melekat, dan yang dipermasalahkan. Adapun yang menjadi subyek penelitian disini yaitu pemerintah kelurahan, PKK yang berjumlah 2 orang , Sekretaris Lurah, Kasi Pemberdayaan masyarakat, dan tokoh masyarakat yang berjumlah 3 orang diantaranya:

Deskripsi data informan

Tabel 1. 1 Data Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	Urai herman s. Tp, mcc. D	42	S2	Lurah
2	Kunto kurnating putro, s.h	42	S1	Sekretaris luras
3	Rosdiana	53	S1	Kasie pemberdayaan masyarakat
4	Rismiyanti	50	S1	Ketua umum PKK
5	Endang	57	D3	Anggota PKK
6	Suji suarni	67	D3	Tokoh masyarakat
7	Samsudin	64	S1	Tokoh masyarakat
8	Sukanto	67	Sma	Tokoh masyarakat

Sumber: hasil wawancara informan 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian informan bekerja dikantor Kelurahan dibandingkan jumlah informan yang lain, dalam

mendapatkan informasi berkaitan dengan Sinergitas Pemerintah Kelurahan dan PKK dalam Pencegahan Stunting. Hal ini sangat diharapkan peneliti agar semua informan dapat memberikan pendapat atau tanggapan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian itu dilakukan, lokasi penelitian ini berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini bisa di wilayah tertentu atau di lembaga tertentu dalam masyarakat, untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta.

Lokasi ini dipilih karena di lokasi ini sinergitas pemerintah kelurahan dan PKK dalam pencegahan stunting belum terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Burhan Bungin mengemukakan bahwa metode pengumpulan data merupakan bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Dalam hal ini diperlukan adanya teknik pengumpulan data yang dapat di gunakan secara cepat dan tepat sesuai dengan masalah yang akan di teliti. Teknik pengumpulan data yang di pakai peliti dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mendakan pengamatan terhadap obyek dan subyek penelitian secara saksama dengan menggunakan seluruh alat indra. Melalui observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku itu sendiri (Arikunto,1998: 146).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tiga (3) kali observasi. Dari observasi tersebut, peneliti memperoleh pengetahuan tentang program pembangunan, potensi lokal baik berupa potensi fisik maupun non-fisik, serta masalah dan kendala yang ada di Kelurahan Kotabaru. Proses observasi ini dilakukan dengan mencermati keberadaan objek dan subjek penelitian dengan memanfaatkan alat indra seperti indra penglihatan dan indra pendengaran.

b. Wawancara

Teknik wawancara mendalam digunakan untuk mengkontruksikan kegiatan dan kejadian serta untuk memverifikasikan dan memperluas data/informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara ini dilakukan dengan menggunakan *interview guide*, dimana petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isinya, agar terjaga pokok-pokok dan yang direncanakan dapat tercapai (Iqbal, 2008: xxxviii).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara yaitu, wawancara langsung di lokasi penelitian. Dalam proses wawancara peneliti memiliki kendala yaitu kesulitan untuk menyesuaikan waktu dengan informan sehingga peneliti tidak dapat leluasa menggali informasi dari informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental (Sugyono,2007: 240). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder ini diperlukan guna melengkapi data primer (observasi dan wawancara) yang telah diperoleh. Dokumentasi dapat berupa profil daerah, artikel. Ataupun berita yang berkaitan dengan pelayanan publik yang diperoleh dari media massa dan lain sebagainya. Selain itu, dokumentasi juga dapat menggunakan dokumentasi visual hasil observasi peneliti di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti sudah mendokumentasikan data primer dan sekunder, data primer merupakan data utama yang diperoleh dari informman yaitu hasil wawancara langsung dengan informan. Hasil wawancara ini di tulis dan direkam guna untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Sementara itu, data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu berupa dokumen profil Kalurahan, profil struktur kelompok PKK, dan berita yang ditulis dalam majalah dan surat kabar.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data, data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teri sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh, data tersebut dapat diperoleh dari literatur, catatan, atau tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian. Oleh karena itu validitas hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh studi pustaka.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. data yang telah dikumpul dari hasil wawancara dan studi kepustakaan dan dokumentasi akan dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Kemudian data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan-kutipan langsung dari hasil wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada analisis data lapangan yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman tentang interaktif model yang menghasilkan analisis data ke dalam tahap-tahap sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Deskripsi berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai.

2) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catata-catatan tertulis lapangan. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

3) Penyajian Data

Penyajian data merupakan hasil reduksi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik

sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan (Miles dan Huberman, 1992: 16-20).

4) Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan beberapa teknik seperti seperti observasi berlanjut, maupun pemeriksaan sejawat melalui diskusi (Moleong,2012:330).

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data data itu sendiri. Adapun langkah operasionalnya di lakukan sebagai berikut:

- a) membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara;
 - b) membandingkan apa yang dilakukan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan seccara pribadi;
 - c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang penelitian;
- dan

d) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dari dari berbagai kalangan.

BAB II

PROFIL KELURAHAN KOTABARU

A. Sejarah Kelurahan Kotabaru

Kampung Kotabaru Kelurahan Kotabaru terletak di Kecamatan Gondokusuman. Letak Kotabaru di sisi utara dibatasi Kelurahan Terban. Sebelah selatan dibatasi Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan. Sisi timur dibatasi Kelurahan Klitren, Kecamatan Gandokusuman. Kemudian bagian barat Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis. Disebut 'Kotabaru' mengacu pada realitas pembangunan hunian dan penataan lingkungan yang baru untuk masyarakat belanda. Istilah 'kota' merujuk pada perancangan wilayah yang menerapkan konsep garden city, dengan langgam bangunan indis.

Inajati Adrisijanti (2002) mengenai implementasi garden city tampak dalam perencanaannya. Terdapat unsur pepohonan dan greenbelt di sekitarnya, dan boulevard berupa jalan raya dua jalur dengan pejalan kaki tengah. Di jalur ini ditanam pepohonan peneduh dan pohon berbunga harum. Prasasti penanda kampung pengok (kiri) dan suasana kampung pengok (kanan). Sumber: survei lapangan tahun 2019, 96 toponim kota yogyakarta rancangan ini guna untuk memenuhi aspek kenyamanan dan keamanan para penghuninya dalam beraktivitas sehari-hari. Hunian warga Belanda di Kotabaru muncul dilatarbelakangi oleh regulasi *decentralisatie wet* (undang-undang desentralisasi) tahun 1903 yang berimbas pada tumbuhnya perkotaan di jada.

Berdasarkan regulasi tersebut, setiap daerah dibentuk pemerintahan otonomi (milone, 1966).

Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang terkena pengaruh decentralisatie wet. Ketika jumlah komunitas Eropa membengkak, hunian baru amatlah diperlukan. Bintaran memadat, Residen Cornelis Canne tanpa ragu memohon supaya diijinkan memakai lahan di sisi utara kota untuk ditempati para tuan kulit putih. Lahan tersedia di timur sungai code akhirnya dibangun pemukiman bernama Nieuwe Wijk (Bruggen, 1988:43). Selain hunian, daerah Kotabaru dijumpai aneka fasilitas pendukung. Misalnya, sarana peribadatan seperti gereja Katholik St. Antonius dan gereja huria Kristen Batak Protestan (Gereformeerde Kerk Djogja), Noviciaat En Pastorie, Kolsani (Kolese Ignatius), sekretariat paroki Gereja St. Antonius, Sekolah Tinggi Kateketik. Juga sarana kesehatan Rs. Bethesda (Petronella Hospital).

Tak ketinggalan pendukung olahraga berupa Stadion Kridosono dan kolam renang Umbang Tirta. Tak lupa sarana edukasi: SD Ungaran, SMA Bopkri, Univesitas Kristen Duta Wacana, Sekolah Tinggi Theologi Duta Wacana. Tak hanya itu, terdapat fasilitas militer dan keamanan, jaringan jalan dan air minum, serta sarana drainage, juga penerangan listrik (Hudiyanto, 1997). Penghubung wilayah Kotabaru dan Pusat Kota, yakni ruas jalan melintasi di atas Sungai Code menuju jalan Malioboro. Menengok sejumlah fasilitas itu, tak mengherankan masyarakat Jogja menyebut pemukiman baru warga Eropa yang dilengkapi berbagai fasilitas itu sebagai Kotabaru.

Berikut adalah visi dan misi kelurahan kotabaru:

Visi:

Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang jujur, adil dan transparan.

Misi:

1. Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang jujur, adil dan transparan
2. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
4. Mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman dan tertib
5. Mewujudkan kelurahan yang berbudaya

B. Geografis

1. Letak Wilayah

Kelurahan Kotabaru merupakan salah satu kelurahan yang berada di bawah naungan Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kelurahan Kotabaru adalah salah satu dari sekian banyak Kelurahan yang berada di Kota Yogyakarta. Berikut ini adalah batas wilayah Kelurahan Kotabaru:

- Sebelah utara: Kelurahan Terban, Gondokusuman Kota Yogyakarta
- Sebelah selatan: Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta
- Sebelah timur: Kelurahan Klitren, Gondokusuman Kota Yogyakarta
- Sebelah barat: Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta.

2. Kondisi fisik wilayah

Kotabaru adalah sebuah Kelurahan yang terletak di Kemantren Gondokusuman, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kelurahan Kotabaru memiliki luas wilayah 0,71 km² serta memiliki curah hujan rata-rata 300,00 mm. Kelurahan Kotabaru memiliki orbitrasi (jarak dari Pusat Pemerintah). Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan yaitu 1 km, jarak dari Pusat Pemerintahan Kota yaitu 3 km, jarak dari Kota/Ibukota Kabupaten 0 km, dan jarak dari Ibukota Provinsi 0 km.

Berikut ini tabel berdasarkan luas wilayah menurut penggunaan:

Tabel 2. 1

Luas wilayah menurut penggunaan

Luas tanah sawah	0,00 ha
Luas tanah kering	41,00 ha
Luas tanah basah	0,00 ha
Luasa tanah perkebunan	0,00 ha
Luas fasilitas umum	30,31 ha
Luas tanah hutan	0,00 ha
Total luas	71,31 ha

Sumber: profil kelurahan kotabaru yogyakarta tahun 2023.

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa kelurahan kotabaru memiliki total luas wilayah yang meliputi tanah kering sebesar 41,00 ha dan penggunaan untuk luas fasilitas umum sebesar 30,31 ha. Dari sini menunjukkan bahwa lahan kering dan fasilitas umum telah mendominasi dari penggunaan lahan lainnya.

C. Demografi kelurahan kotabaru

Jumlah penduduk kelurahan kotabaru pada tahun 2023 tercatat laki-laki berjumlah 1499 jiwa, dan perempuan berjumlah 1579 jiwa.

Tabel 2. 2

Penduduk berdasarkan tahun

Jumlah	Laki laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	1499	1579
Jumlah penduduk tahun lalu	1488	1578

Sumber: profil kelurahan kotabaru 2022.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan setiap tahunnya tidak jauh berbeda. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki.

1. Penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2. 3

Penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah jiwa
1.	Laki-laki	1499
2.	Perempuan	1579
	Jumlah total	3078

Sumber: profil kelurahan kotabaru 2022.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan jumlahnya tidak jauh berbeda. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki.

2. Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2. 4

Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk tk	51 orang	53 orang
2.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	331 orang	322 orang
3.	Tamat sd	122 orang	131 orang
4.	Tamat smp	171 orang	194 orang
5.	Tamat sma/smu	348 orang	375 orang
6.	Tamat d-1/ sederajat	14 orang	20 orang
7.	Tamat s-1/ sederajat	277 orang	292 orang
8.	Tamat s-2/ sederajat	56 orang	38 orang
9.	Tamat s-3/ sederajat	10 orang	2 orang
	Jumlah	2807 orang	

Sumber: profil kelurahan kotabaru 2023.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk kelurahan kotabaru cukup produktif.

3. Kondisi ekonomi

a. Mata pencaharian

PNS dan Buruh Harian Lepas merupakan yang mendominasi di Kelurahan Kotabaru. Hal ini menunjukkan bahwa mata pencaharian Kelurahan Kotabaru adalah berbeda-beda dan beragam. Berikut adalah uraian data, total mata pencaharian Kelurahan Kotabaru:

Tabel 2. 5

Penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	2 orang	0 orang
2.	Buruh tani	1 orang	0 orang
3.	Pegawai negeri sipil	45 orang	46 orang
4.	Peternak	1 orang	0 orang
5.	Dokter swasta	11 orang	14 orang
6.	Perawat swasta	0 orang	9 orang

No	Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
7.	Tni	50 orang	1 orang
8.	Polri	8 orang	2 orang
9.	Guru swasta	4 orang	17 orang
10.	Dosen swasta	8 orang	7 orang
11.	Seniman	1 orang	1 orang
12.	Tukang batu	2 orang	0 orang
13.	Pembantu rumah tangga	0 orang	7 orang
14.	Pengacara	1 orang	0 orang
15.	Notaris	1 orang	1 orang
16.	Desainer	4 orang	2 orang
17.	Karyawan perusahaan swasta	247 orang	163 orang
18.	Karyawan perusahaan pemerintah	6 orang	7 orang
19.	Belum bekerja	301 orang	296 orang
20.	Pelajar	379 orang	346 orang
21.	Ibu rumah tangga	0 orang	401 orang
22.	Pensiunan	59 orang	28 orang
23.	Buruh harian lepas	77 orang	34 orang
24.	Kontraktor	4 orang	0 orang
25.	Sopir	2 orang	0 orang
26.	Tukang jahit	0 orang	1 orang
27.	Jasa konsultan manajemen dan teknis	1 orang	0 orang
28.	Karyawan honorer	5 orang	2 orang
29.	Psikolog	0 orang	1 orang
30.	Wartawan	1 orang	0 orang
31.	Tukang listrik	1 orang	0 orang
32.	Apoteker	0 orang	4 orang
33.	Biarawati	0 orang	21 orang
	Jumlah total penduduk	2633	

Sumber: profil kelurahan kotabaru tahun 2023.

Berdasarkan data tabel diatas terlihat profesi sebagai karyawan perusahaan swasta adalah profesi yang sangat mendominasi dari profesi lainnya di Kelurahan Kotabaru. Adanya potensi Kelurahan yang memiliki potensi wilayah perusahaan menjadi salah satu yang mendorong masyarakat Kelurahan Kotabaru memilih profesi yaitu sebagai karyawan perusahaan swasta sebagai mata pencaharian.

b. Pengangguran

Jumlah penduduk Kelurahan Kotabaru yang belum bekerja adalah berjumlah 597 orang.

c. Perumahan dan kemiskinan

Berdasarkan data yang didapat Kelurahan Kotabaru mempunyai kondisi kehidupan yang cukup miskin. Jumlah penduduk Kelurahan Kotabaru yang masuk dalam kategori miskin adalah sejumlah 182 jiwa (menurut standar BPS) dengan 57 KK.

D. Sarana dan prasarana

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 c ayat 1 dan pasal 31 faktor yang terpenting dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara adalah pendidikan dan ini merupakan faktor yang bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat tentunya untuk membentuk moral serta kepribadian dari setiap manusia dalam kehidupan sosial masyarakat agar menjadi lebih baik. Di bawah ini merupakan data sarana dan prasarana pendidikan di kelurahan kotabaru.

Tabel 2. 6

Sarana dan prasarana pendidikan

No	Jenis sarana dan prasarana Pendidikan	Jumlah unit
1.	Gedung kampus pts	2
2.	Gedung sma/ sederajat	3
3.	Gedung smp/ sederajat	2
4.	Gedung sd/ sederajat	4
5.	Gedung tk	3
6.	Jumlah lembaga pendidikan agama	1

Sumber: Profil Kelurahan Kotabaru Tahun 2023.

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa gedung SD/ sederajat berjumlah 4 unit dan ini menjadikan SD mendominasi prasarana pendidikan di Kelurahan Kotabaru. Kemudian, 3 unit gedung SMA/ sederajat dan gedung TK, 2 unit SMP/ sederajat dan gedung Kampus PMT, jumlah lembaga pendidikan agama yaitu 1 unit.

1. Prasarana ibadah

Tempat ibadah, adalah tempat sakral yang digunakan untuk berdoa/ beribadah berdasarkan ajaran agama yang diakui di Indonesia. Di bawah ini merupakan data tempat ibadah di Kelurahan Kotabaru:

Tabel 2. 7

Prasarana ibadah

No	Tempat ibadah	Total
1.	Jumlah masjid	8
2.	Jumlah gereja kristen protestan	2
3.	Jumlah gereja katolik	1

Sumber: profil kelurahan kotabaru tahun 2023.

Data di atas menunjukkan bahwa masjid lebih mendominasi dari gereja, yang diartikan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Kotabaru mayoritas memeluk agama Islam, berdasarkan jumlah tempat ibadah yaitu 8 masjid. 2 untuk gereja Kristen Protestan, dan 1 untuk gereja Katolik, ini membuktikan bahwa keberagamannya umat beragama di Kelurahan Kotabaru.

2. Sarana dan prasarana kesehatan

Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dilakukan untuk menunjang kesehatan masyarakat. Ini sangat berpotensi dan berdampak positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat dengan adanya sarana

prasaran tersebut sangat membantu menjaga kesehatan masyarakat yang bisa melahirkan sdm yang baik. Berikut adalah data sarana dan prasarana kesehatan di kelurahan kotabaru:

Tabel 2. 8
Sarana dan prasarana kesehatan

No	Prasarana	Gedung/unit
1.	Rumah sakit umum	2
2.	Poliklinik/balai pengobatan	3
3.	Apotek	2
4.	Posyandu	5
5.	Kantor praktek dokter	3

Sumber: Profil Kelurahan Kotabaru Tahun 2023.

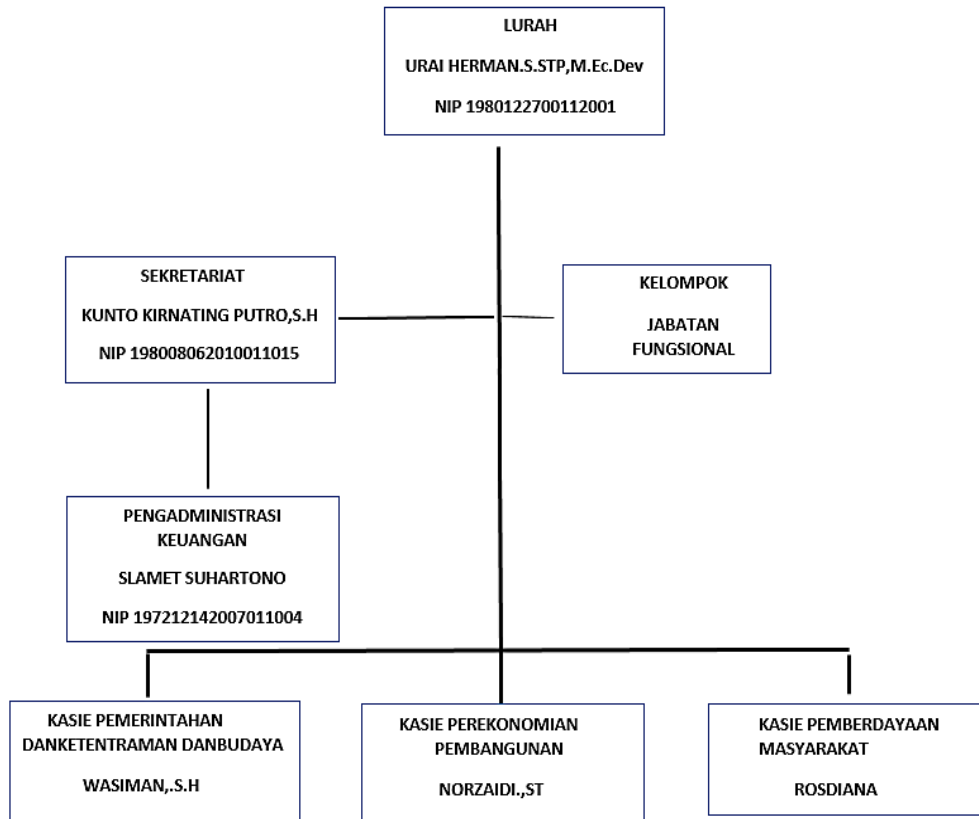
Dari data di atas dijelaskan bahwa tingkat kepedulian pemerintah terhadap kesehatan penduduk yaitu posyandu dan poliklinik/balai pengobatan menjadi prioritas Pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah unit untuk posyandu dan poliklinik/balai pengobatan dengan total 8 unit, kemudian Rumah Sakit umum dan apotek berjumlah 2 unit. Walaupun begitu Rumah Sakit dijadikan penunjang kesehatan masyarakat Kelurahan Kotabaru, terlihat dari data tabel di atas sarana dan prasarana Kelurahan Kotabaru sudah terbilang cukup baik.

E. Lembaga Pemerintahan Kelurahan Kotabaru

1. Struktur Pemerintahan Kelurahan Kotabaru

Bagan 2. 1

Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Kotabaru

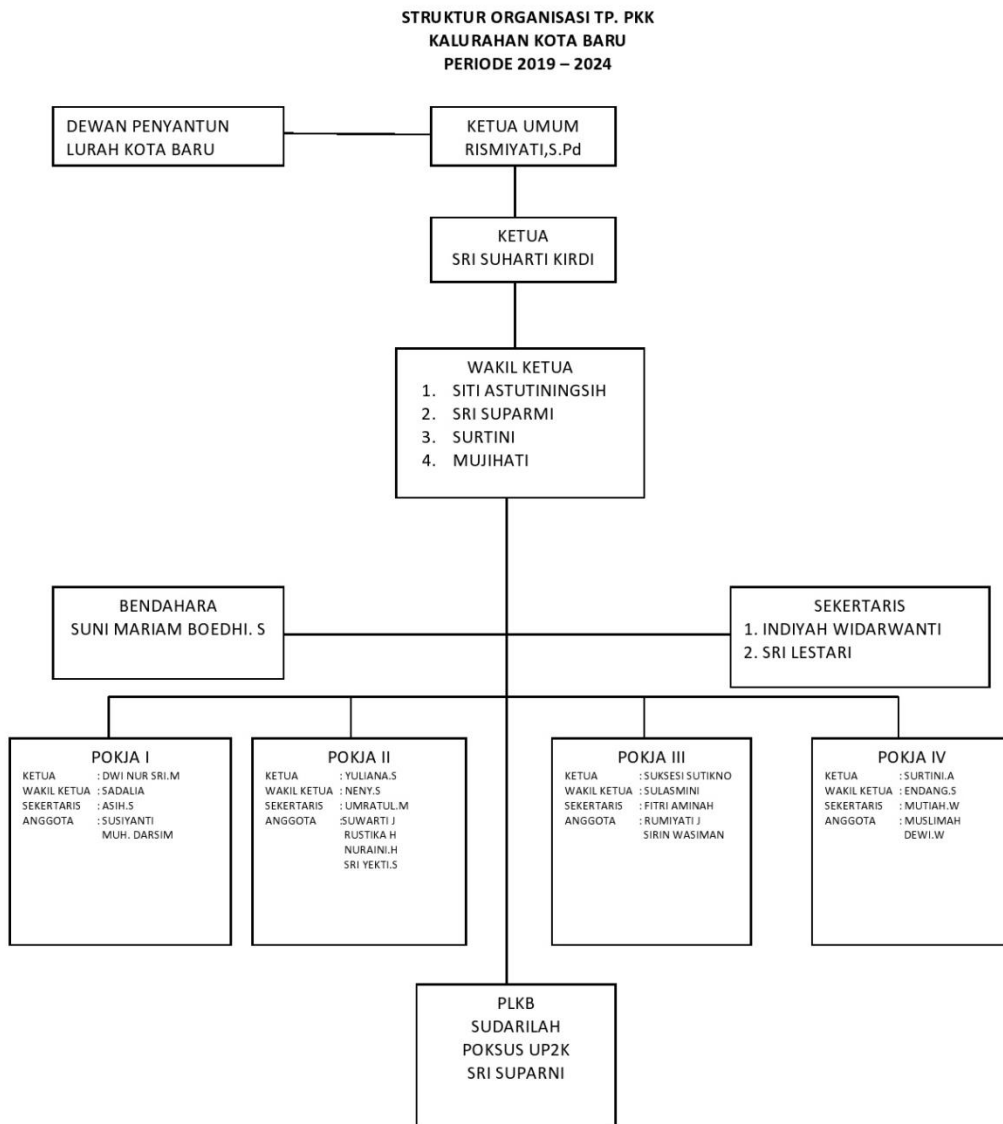


Susunan organisasi Pemerintahan Kotabaru terdiri dari Lurah dan Perangkat Lurah. Perangkat Lurah terdiri dari Sekretaris Lurah dan Perangkat Lurah lainnya. Sekretaris Lurah terdiri dari pengadministrasian keuangan. Pengadministrasian keuangan terdiri dari Kasie Pemerintahan dan Ketentraman dan Budaya, Kasie Perekonomian Pembangunan dan Kasie Pemberdayaan Masyarakat.

2. Susunan pengurus

Susunan pengurus ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (tp-PKK) rukun tetangga dan rukun warga Kelurahan Kotabaru masa bhakti 2020-2023.

Bagan 2.2
Susunan Pengurus PKK



PKK adalah salah satu wadah yang telah mampu menggerakkan serta membangkitkan kemampuan perempuan sebagai motor penggerak untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna membutuhkan, menghimpun, mengarahkan dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. PKK bertujuan memberdayakan keluarga, untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan harus tampil di depan untuk memberikan motivasi serta dukungan yang kongkrit kepada masyarakat.

Tim penggerak PKK berperan sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkatan. Tim penggerak PKK desa dapat menyesuaikan dan mengembangkan lebih lanjut dengan muatan lokal sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan yang nyata di desanya masing-masing dengan menyalahgunakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di desa secara optimal.

Secara umum kegiatan tim penggerak PKK kelurahan kotabaru dalam melaksanakan 10 program pokok PKK sudah cukup baik dimana pelaksanaan tersebut disesuaikan dengan program kerja tim penggerak PKK kelurahan kotabaru kecamatan gondokusuman. Sesuai dengan kondisi yang ada di kelurahan kotabaru kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Memberikan penjelasan tentang 10 program pokok PKK administrasi PKK kelurahan.
2. Menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh PKK kecamatan.
3. Mengikutsertakan kader-kader PKK kelurahan dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang dilaksanakan oleh tp PKK kecamatan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang relevan dengan masalah peneliti.

Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap pelaksanaan merupakan hasil dari apa yang sudah disepakati dalam tahap perencanaan. Setiap rencana yang merupakan hasil dari proses perencanaan perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan. Relasi Pemerintah Kelurahan dan PKK Dalam pelaksanaan pencegahan stunting di Kelurahan Kotabaru sudah terbilang cukup baik. Relasi yang dijalankan dengan baik dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan di kelurahan yang bekerja sama dengan PKK dalam menentukan program yang dijalankan. Sosialisasi sebagai program pencegahan stunting kepada masyarakat didukung oleh berbagai pihak mulai dari perangkat kelurahan yang selanjutnya diteruskan melalui kader, melalui forum ibu-ibu, dan juga ada yang berwujud penyuluhan. Selain itu, dalam pelaksanaan pencegahan stunting dibutuhkan juga pendataan terhadap kelompok sasaran. Kegiatan ini dilakukan di tingkat kelurahan dikoordinasi oleh kasi kemudian dilimpahkan melalui kader PKK stunting yang ada di tiap posyandu. Selain itu, dalam melakukan pendataan kader stunting juga melakukan pendataan dengan mendatangi rumah masyarakat misalnya ada ibu hamil.

Ini berarti, bahwa pemerintah kelurahan kotabaru sebagai pemerintah tertinggi di kelurahan dan PKK sebagai suatu lembaga yang menjalankan tugas secara bersama-sama dalam mensejahterakan masyarakat melalui program sosialisasi. Dalam

pencegahan atau penanganan stunting di kelurahan kotabaru pemerintah kelurahan kotabaru juga membentuk suatu wadah atau lembaga yang bertanggung jawab atas program yang dijalankan dalam pencegahan stunting ini. Wadah tersebut yaitu rds (rumah desa sehat) yang beranggotakan kader PKK dan pihak yang dilibatkan dalam pencegahan stunting. Kedua, menyelenggarakan rembuk stunting kelurahan guna menganalisis temuan yang ada di lapangan. Dalam kegiatan ini kelurahan dan PKK dikoordinasi oleh rds tujuannya untuk memberikan masukan-masukan agar proses pelaksanaan pencegahan stunting dapat berjalan dengan baik. Ketiga, upaya pencegahan stunting harus sejalan dengan peningkatan pelayanan posyandu, yang tentunya dalam posyandu terdapat berbagai kegiatan yang mendukung terkait pencegahan stunting seperti kegiatan paud dan pmt.

2. Dalam pencegahan stunting, Pemerintah Kelurahan Kotabaru tampil sebagai institusi sekaligus aktor yang inklusif dengan berinteraksi secara intensif dengan PKK. Pemerintah Kelurahan Kotabaru membentuk relasi kemitraan dengan PKK. Relasi kemitraan ini berbasis pada koordinasi, konsultasi, komunikasi, dan kepercayaan satu sama lain.

3. Dalam mewujudkan program pencegahan stunting ini tidak terlepas dari adanya kendala-kendala dan masalah, terutama yang terjadi dalam usaha pencegahan stunting di kelurahan kotabaru, beberapa kendala tersebut seperti fasilitas penunjang, anggaran di tingkat kelurahan, tingkat pendidikan, perhatian dan pola asuh orang tua terhadap anak, partisipasi dari ibu-ibu sasaran dalam mengikuti program pmt tidak dilanjutkan oleh ibu-ibu sasaran di rumah mereka masing-masing, masih ada beberapa yang terlambat dalam penganggaran dana untuk pencegahan stunting dan komitmen dalam

mendorong program pencegahan stunting juga merupakan bukti keseriusan pemerintah kelurahan untuk menurunkan jumlah stunting yang ada.

B. Saran

Berdasarkan uraian fakta dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran terkait sinergitas pemerintah kelurahan dan PKK dalam pencegahan stunting, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kelurahan kotabaru diharapkan agar terus berupaya dalam pencegahan stunting, melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, pendataan dengan mendatangi rumah-rumah ibu hamil dan kegiatan pmt (pemberian makanan tambahan).
2. Bagi pemerintahan kelurahan kotabaru dan PKK diharapkan untuk tetap mempertahankan sinergitas yang sudah terjalin sedemikian selarasnya dan ke depannya semoga sinergi tersebut dapat diperbaharui menjadi lebih intens lagi, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga diharapkan lebih efektif dalam menjalankan program-program dengan memberi sosialisasi terhadap masyarakat mengenai stunting.
3. Bagi masyarakat yang memiliki balita penderita stunting agar selalu hadir dalam kegiatan posyandu yang diadakan. Pentingnya mengikuti kegiatan ini agar dapat dipantau tumbuh kembang balita dari bulan ke bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendi, b. (2002). *Pembangunan daerah otonomi berkeadilan*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Hawai, h. (1991). *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: gadjah mada university.
- Irianto, h. D. (2006). *Pokok-pokok penring dalam wawancara. Dalam burhan bungin (edt). Metode penelitian kualitatif, aktualisasi metodologi ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: pt. Raja grafindo persada .
- Lexy j, m. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: remaja rosdakarya.
- Siagian, s. P. (2005). *Administrasi pembangunan, konsep dimensi dan strateginya*. Jakarta: bumi askar.
- Sugiono. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: alfabeta.
- Taylor, b. &. (1992). *Pengantar meotode penelitian kualitatif suatu pendekatan fenomenologis terhadap ilmu-ilmu sosial*. Surabaya: usaha nasional.
- Trijono, l. (2007). *Pemabangunan sebagai perdamaian*. Jakarta: yayasan obor indonesia.

Jurnal

- budiman, d. (2019). Sinergitas antara pemerintas desa dan tokoh adat dalam mempertahankan tanah adat (studi kasus desa laham, kecamatan laham, kabupaten mahakam ulu). *E-journal ilmu pemerintahan integrative*, 7(3), 296-305.
- Saufi, a. (2021, august). Dinamika collaborative governance dalam penanggulangan stunting ditengah pandemi covid-19. In *prosiding seminar nasional penanggulangan kemiskinan* (vol. 1, no. 1).
- Kumanireng, h. Y. N. L., & triputro, r. W. (2021). Gerobak cinta: model pencegahan stunting di kabupaten flores timur nusa tenggara timur. *Journal of indonesian rural and regional government*, 5(2), 203-220.
- Purbadiri, a. M., & srimurni, t. (2022). Pemenuhan hak kesehatan balita dalam rangka pencegahan stunting melalui pelaksanaan posyandu keliling di kabupten lumajang. *Community: jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 2(1), 1-11.
- Salmon, h. S., monintja, d. K., & kumayas, n. (2022). Strategi pemerintah dalam mengatasi stunting di kabupaten kepulauan sangihe (studi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana sangihe). *Governance*, 2(2).

- Yudiana, t. (2022). Strategi penguatan sdm dalam percepatan penurunan stunting di provinsi kepulauan riau. *Jurnal good governance*.
- Widyastuti, y., arenawati, a., & prafitri, n. (2022). Implementasi kebijakan konvergensi pencegahan stunting melalui rumah desa sehat (rds) di desa sindangsari kecamatan pabuaran kab. Serang. *Jipags (journal of indonesian public administration and governance studies)*, 6(2).
- Ardiyani, a.f. (2021). Peran imp dalam mengatasi masalah stunting di kampung kb ‘ngudi kencana’ desa kalitenggar kidul kecamatan padamara kabupaten purbalingga.
- Sunaryo, d. R., candradewini, c., & arifianti, r. (2021). Implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di kabupaten bandung. *Responsive: jurnal pemikiran dan penelitian administrasi, sosial, humaniora dan kebijakan publik*, 4(4), 205-213.
- Fauziah, f., & novandi, d. (2021). Aksi pencegahan kasus stunting di kota samarinda melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (pro-bebaya). *Jurnal riset inossa*, 3(2), 76-86.
- Silpia, f. R. (2019). *Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting (gangguan pertumbuhan pada anak) didesa pancasila kecamatan natar lampung selatan* (doctoral dissertation, uin raden intan lampung).

Sumber lain

- Peraturan presiden nomor 72 tahun 2021, tentang percepatan penurunan stunting.
- Undang-undang nomor 25 tahun 2024 sistem perencanaan pembangunan nasional.
- Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- Undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas informan

Nama :

Usia :

Jenis kelamin :

Jabatan :

Hari/tanggal :

Waktu :

A. Relasi pemerintah kelurahan dan PKK dalam pelaksanaan pencegahan stunting

1. Bagaimana pemerintah kelurahan memandang masalah stunting di kelurahan kotabaru?
2. Bagaimana pemerintah kelurahan mengontrol pelaksanaan program dalam pencegahan stunting?
3. Menurut bapak, upaya apa saja yang dapat mendorong pelaksanaan pencegahan stunting?
4. Bagaimana kerjasama pemerintah kelurahan dan PKK dalam tahap pelaksanaan pencegahan stunting?
5. Apa saja bentuk kerja sama dalam tahap pelaksanaan mencegah stunting di kelurahan kotabaru?
6. Siapa saja yang terlibat kerja sama dalam tahap pelaksanaan pencegahan stunting di kelurahan kotabaru?
7. Apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan kotabaru dalam mencegah stunting?

8. Bagaimana pemerintah kelurahan kotabaru menjalankan kebijakan pencegahan stunting?
9. Bagaimana pemerintah kelurahan kotabaru melibatkan masyarakat dalam tahap pelaksanaan pencegahan stunting?
10. Siapa saja yang terlibat dalam proses sosialisasi untuk pencegahan stunting se-kelurahan kotabaru?
11. Bagaimana peran PKK dalam mengatasi stunting di kelurahan kotabaru?
12. Bagaimana respon pemerintah kelurahan kotabaru terkait peran yang dilakukan PKK?
13. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah kelurahan kotabaru dalam pencegahan stunting?
14. Bagaimana pemerintah kelurahan kotabaru mengatasi kendala tersebut?

B. Interaksi Pemerintah Kelurahan dan PKK Dalam Pelaksanaan Pencegahan Stunting

1. Bagaimana Bapak/Ibu memandang masalah stunting di kelurahan Kotabaru?
2. Bagaimana kerjasama pemerintah kelurahan dan PKK dalam tahap pelaksanaan pencegahan stunting?
3. Apa saja bentuk kerja sama dalam tahap pelaksanaan mencegah stunting di Kelurahan Kotabaru?
4. Siapa saja yang terlibat kerja sama dalam tahap pelaksanaan pencegahan stunting di kelurahan kotabaru?
5. Apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan kotabaru dalam mencegah stunting?
6. Bagaimana pemerintah kelurahan kotabaru menjalankan kebijakan pencegahan stunting?

7. Bagaimana pemerintah kelurahan kotabaru melibatkan masyarakat dalam tahap pelaksanaan pencegahan stunting?
8. Siapa saja yang terlibat dalam proses sosialisasi untuk pencegahan stunting se-kelurahan kotabaru?

C. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pencegahan stunting

1. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan dan pencegahan stunting di kelurahan kotabaru?
2. Bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut?
3. Apa ada fasilitas penunjang yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di kelurahan kotabaru?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait dengan pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting ini?
5. Bagaimana kerja sama antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat dalam pencegahan stunting di kelurahan kotabaru?
6. Setau bapak/ibu, apakah pemerintah melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam pencegahan stunting di kelurahan kotabaru?
7. Menurut bapak/ibu, seperti apa bentuk keterlibatan masyarakat dalam pencegahan stunting di kelurahan kotabaru?

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan bapak lurah kotabaru



2. Wawancara dengan sekretaris lurah



3. Wawancara dengan kasi



4. Wawancara dengan anggota PKK



5. wawancara dengan tokoh masyarakat



